

Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGS dalam laporan keberlanjutan

Wisnu Setyawan¹, Nanny Dewi Tanzil¹, Dini Rosdini¹

¹Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Indonesia.

Abstract

Disclosure of entity support for the objectives of the UN-SDGs is in line with Stakeholder Theory, where internal and external parties have an interest in information about corporate governance responsibilities in carrying out their business activities. The Sustainability Report is a medium for entities to disclose their responsibilities towards economic, social, and environmental aspects, as well as their support for the UN-SDGs agenda. This study aims to prove the relationship and influence of corporate governance on the disclosure of SDGs support in their Sustainability Reporting. The data sampling used is 76 Sustainability Reports published through the NCSR with GRI standards for the 2017-2019 reporting period. The results show that the corporate governance have a relationship with the disclosure of SDGs support in the Sustainability Reporting, but only the variable of Sustainability Officer in the corporate governance construct shows a significant effect. This shows that sustainability governance is the key in meeting the information needs of stakeholders related to the company's sustainability, especially the company's support for the goals of the UN-SDGs Agenda.

Keywords: Sustainability Development Goals; Sustainability Reporting; Corporate Governance; Stakeholder Theory

Abstrak

Pengungkapan dukungan entitas terhadap tujuan UN-SDGs selaras dengan teori pemangku kepentingan di mana pihak internal maupun eksternal berkepentingan terhadap informasi terkait tanggung jawab tata kelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Laporan keberlanjutan adalah salah satu media untuk mengungkapkan tanggung jawab entitas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan juga dukungan mereka terhadap agenda UN-SDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan dan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan. Data yang digunakan adalah 76 laporan keberlanjutan yang dipublikasikan melalui NCSR dengan standar GRI pada periode pelaporan 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan, tetapi hanya variabel keberadaan pejabat keberlanjutan dalam konstruk tata kelola perusahaan yang menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keberlanjutan menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan terkait keberlanjutan perusahaan, khususnya dukungan perusahaan terhadap tujuan UN-SDGs.

Kata Kunci: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Laporan Keberlanjutan; Tata Kelola Perusahaan; Teori Pemangku Kepentingan; SDGs

PENDAHULUAN

Sustainability Development Goals (SDGs) yang dideklarasikan pada bulan September 2015 oleh 193 kepala negara yang hadir dalam sidang umum PBB di New York membahas pengentasan kemiskinan beserta faktor penyebabnya, peningkatan kemampuan manusia, pengurangan ketidakesetaraan, perdamaian, pengembalian degradasi planet, dan penguatan kemitraan global dalam rangka pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2019a). Agenda ini mulai diimplementasikan pada 1 Januari 2016 yang diagendakan hingga 15 tahun sejak dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030 (United Nations, 2019b).

Tiga pilar utama dalam aspek keberlanjutan (sosial, lingkungan, dan ekonomi) dikembangkan ke dalam lima prinsip dasar SDGs yang disebut sebagai 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*). Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari 17 tujuan yang terdiri dari 169 sasaran yang

Tabel 1. Jumlah Perusahaan dan Peningkatan ASRR

Tahun	Peringkat				Jumlah Perusahaan
	Platinum	Gold	Silver	Bronze	
2019	5	32	3	4	44
2018	9	37	4	0	50
2017	10	30	8	8	56

Sumber: NCSR (2020).

dituangkan ke dalam 242 indikator (United Nations, 2018). Secara umum di bawah agenda baru ini, ada harapan bahwa pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat luas bersama-sama bertanggung jawab dalam mempromosikan dan mendukung terwujudnya tujuan pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Korporasi sebagai organisasi tidak hanya berfokus kepada penciptaan nilai, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas operasi perusahaan (Elkington, 1998). Pengungkapan dukungan SDGs pada laporan keberlanjutan perusahaan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan perusahaan (Elalfy, Weber, & Geobey, 2021). Disamping itu, pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*/SR) menjadi tolok ukur bagi kinerja keberlanjutan perusahaan (Lashitew, 2021).

Suatu organisasi dapat memilih dan menentukan media yang digunakan dalam mengungkapkan kinerja dan tanggung jawab organisasi terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pelaporan yang saat ini cukup populer digunakan beberapa entitas diantaranya SR yang berpedoman pada GRI 4 (Ioannou & Serafeim, 2017).

Salah satu standar pelaporan keberlanjutan yang mendukung pengungkapan SDGs adalah standar *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaporan SR. GRI dan beberapa organisasi regional juga turut serta dalam menyosialisasikan dan mempromosikan ke berbagai instansi pemerintah dan entitas swasta untuk mengungkapkan keberlanjutan organisasi mereka melalui SR. Terdapat setidaknya 480 organisasi dari 68 negara yang aktif dalam komunitas GRI (Cukuranovic, 2021).

Pada beberapa wilayah hukum termasuk di Indonesia, pelaporan keberlanjutan masih bersifat sukarela. Hal tersebut membuat pengungkapan keberlanjutan dalam SR antara entitas yang satu dengan lainnya tidak sama (Farida, 2019). Setiap tahun, terdapat 30 sampai dengan 40 perusahaan di Indonesia yang melaporkan SR-nya dengan menggunakan standar GRI melalui NCSR. Tabel 1 menunjukkan jumlah perusahaan serta perolehan peringkat atas laporan SR dalam 3 tahun terakhir.

Dalam 3 tahun terakhir, sudah banyak perusahaan di Indonesia yang mengungkapkan dukungan SDGs melalui SR. Namun, penelitian terkait pengungkapan dukungan SDGs di Indonesia terbilang masih sedikit, terlebih lagi yang menghubungkan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan dukungan SDGs.

Salah satu faktor yang berperan terhadap pengungkapan SDGs dalam SR adalah tata kelola perusahaan (Farida, 2019; Girón *et al.*, 2020). Tata kelola organisasi (*corporate governance*-CG) yang baik menentukan kinerja dan tanggung jawab sebuah entitas, termasuk kinerja dan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas dan operasi bisnis entitas (Kend, 2015). Praktik tata kelola perusahaan yang baik juga mendorong terlaksananya proses pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang sehat, yang mengedepankan 4 prinsip utama: keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab (Smallman, 2007).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tidak semua unsur dalam CG memengaruhi kesesuaian pengungkapan SR, dan tidak semua dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) dipengaruhi oleh CG. Variabel yang paling sering digunakan dalam literatur dalam memproksikan struktur CG adalah independensi dan komposisi anggota dewan. Kedua variabel ini bisa diukur dengan jumlah direktur di dewan, persentase direktur independen, dualitas CEO, persentase non-eksekutif direktur, kepemilikan manajerial, wanita di dewan, dan keberadaan komite CSR (atau direktur CSR). Proksi-proksi tersebut sering dianggap memengaruhi kinerja CSR dan kesesuaian pengungkapan SR (Hussain, Rigoni, & Orij, 2018; Jangu *et al.*, 2014).

Pengintegrasian pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan dengan pedoman standar GRI 4 menjadi sarana bagi organisasi dalam mengungkapkan dukungan entitas terhadap SDGs melalui laporan keberlanjutannya (Girón *et al.*, 2020). Beberapa unsur dalam tata kelola perusahaan seperti keberadaan wanita dalam komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan SDGs (Farida, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan dan kontribusi tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

Teori pemangku kepentingan membantu untuk memahami keputusan pengalokasian sumber daya internal perusahaan yang dikaitkan dengan tuntutan pemangku kepentingan yang menentukan kesuksesan perusahaan (Freeman & McVea, 2017). Persepsi tentang pentingnya pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan bergantung pada penyedia sumber daya vital perusahaan (Agle, Mitchell, & Sonnenfeld, 1999). Namun demikian, pemilik perusahaan melalui pengelolanya bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan (Dragu, 2013).

Pemilik perusahaan adalah pemegang saham, sedangkan manajer (*executive directors*) menggunakan kekuasaan dan tanggung jawab dalam mengambil kebijakan dengan mengatasmakan kepentingan pemegang saham perusahaan (Kay & Silberston, 1995). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah sekelompok orang yang secara langsung terlibat dalam kebijakan operasi dan bisnis perusahaan, dan bertanggung jawab atas efektifitas dan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Tata kelola perusahaan memberi peran dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dimana salah satunya adalah melalui pengungkapan dukungan perusahaan terhadap SDGs (Girón *et al.*, 2020).

Hubungan pemangku kepentingan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan melalui upaya entitas bisnis dalam memenuhi ekspektasi etika, hukum, dan komersial tertentu yang berlaku di masyarakat. Entitas yang baik dapat dilihat melalui kerangka tanggung jawab sosial dan prinsip-prinsip keberlanjutannya (Idowu *et al.*, 2013).

Penelitian yang dilakukan pada 9.397 perusahaan di dunia yang melaporkan SR dengan berpedoman pada standar GRI menunjukkan bahwa perusahaan besar dan perusahaan publik lebih memilih pengungkapan dukungan SDGs melalui pelaporan keberlanjutan, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan (Elalfy, Weber, & Geobey, 2021). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa negara-negara yang memiliki lembaga swadaya (NGO) yang berafiliasi dengan GRI, seperti Portugal dan Spanyol lebih memilih penggunaan SR dalam mengungkapkan dukungan terhadap SDGs (Fialho *et al.*, 2020).

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam model manajemen strategi dan operasi (Claro & Esteves, 2021) social and economic factors that impact stakeholders and sustainable development. They could be a crucial contribution of the private sector to Sustainable Development Goals (SDGs antara lain sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pemangku kepentingan serta pemahaman bahwa agenda SDGs 2030 adalah kontrak etis dan sosial (Santos & Bastos, 2020). Selain itu, pengintegrasian SDGs dalam model manajemen strategi dan operasi organisasi juga semakin banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengukur dan mengomunikasikan kinerja keberlanjutan organisasi (Lashitew, 2021).

Dewan direksi perusahaan memiliki peran penting dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan strategi, struktural level atas, dan penunjukan CEO. Fungsi utama dewan direksi adalah untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat dipenuhi dengan pengawasan kepada manajemen eksekutif perusahaan (Hakovirta *et al.*, 2020).

Ukuran direksi tidak hanya berpengaruh terhadap keputusan dalam memilih standar pelaporan yang digunakan (Kılıç & Kuzey, 2020), tetapi juga berperan dalam memengaruhi kinerja pengungkapan SR (Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018). Penelitian yang dilakukan pada 148 perusahaan terdaftar di *Colombo Stock Exchange* Srilanka mengungkapkan bahwa ukuran direksi memiliki hubungan dengan kualitas laporan keberlanjutan perusahaan (Shamil *et al.*, 2014) the purpose of this paper is to investigate the influence of board characteristics on sustainability reporting of listed companies in the Colombo Stock Exchange (CSE. Hasil ini dipertegas oleh penelitian yang dilakukan 4 tahun kemudian, yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan ukuran direksi yang besar memiliki kualitas pelaporan keberlanjutan yang lebih baik (Mudiyanselage, 2018).

Penelitian lain pada 121 perusahaan terdaftar di bursa efek *Middle East and Africa* menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi (Kilincarslan, Elmagrhi, & Li, 2020). Hasil serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan pada 99 perusahaan non-keuangan di semenanjung Iberian (Cancela *et al.*, 2020). Penelitian yang lebih luas dilakukan pada 536 perusahaan yang beroperasi di negara-negara yang memiliki undang-undang hukum perdata terhadap perlindungan kepentingan *stakeholder* menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap hasil keputusan penjamin mutu keberlanjutan (Martinez-Ferrero, Rodríguez-Ariza, & García-Sánchez, 2017). Oleh karena itu, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁: Ukuran direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

Perusahaan dengan tingkat proporsi komisaris independen yang besar cenderung meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan (Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018; Mudiyanselage, 2018; Buallay & Al-Ajmi, 2019) based on a cross-sectional and time series analysis of 59 banks from 2013 to 2017. A multivariate model is used to investigate the impact of selected audit committee attributes (financial

expertise, size, members' independence and meeting frequency. Peran komisaris independen terhadap kualitas SR ditunjukkan dalam hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Asia Selatan (Masud, Nurunnabi, & Bae., 2018). Hasil penelitian pada 100 laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Srilangka mempertegas peran komisaris independen dalam pengungkapan keberlanjutan perusahaan (Mudiyanselage, 2018). Hasil penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Gulf Cooperation Council juga mempertegas pernyataan tersebut (Buallay, 2019) social and governance (ESG). Sementara itu, SR berperan sebagai media bagi perusahaan dalam mengungkapkan dukungan terhadap SDGs (Elalfy, Weber, & Geobey, 2021; Fialho *et al.*, 2020). Berdasarkan tersebut tersebut, hipotesis selanjutnya dalam penelitian ini adalah:

H₂: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

Meskipun tidak semua perusahaan memiliki komite khusus yang menangani isu-isu terkait keberlanjutan, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan keberadaan komite *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun *Committee on Sustainability* (CSO) menentukan kualitas dan kinerja pengungkapan SR (Jamil, Ghazali, & Nelson, 2020; Adel *et al.*, 2019; Helfaya & Moussa, 2017). Peran komite CSR/CSO dalam mengidentifikasi dan mengintegrasikan SDGs di dalam model manajemen strategi dan operasi perusahaan merupakan bentuk perwujudan kepedulian perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan (Claro & Esteves, 2021) social and economic factors that impact stakeholders and sustainable development. They could be a crucial contribution of the private sector to Sustainable Development Goals (SDGs; Santos & Bastos, 2020). Di Indonesia, hanya sedikit sekali ditemukan perusahaan yang mengungkapkan keberadaan komite CSR maupun CSO, sehingga di dalam tata kelola pada beberapa perusahaan terdapat jabatan manajer yang menangani CSR maupun isu terkait keberlanjutan (*sustainability officer*) di tingkat manajemen atas maupun tingkat divisi. Sehubungan dengan itu, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃: Keberadaan pejabat CSR/*Sustainability Officer* berpengaruh positif terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

Secara teori, keberadaan wanita berpengaruh positif terhadap etika dan kepatuhan. Namun lain halnya di negara yang menjadikan SR dan pengungkapan SDGs sebagai keharusan yang memaksa (*mandatory*). Hasil penelitian di Asia Selatan menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam dewan memberikan karakteristik keberagaman pada tata kelola perusahaan (Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018). Disamping itu, keberadaan wanita dalam dewan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan SR (Mudiyanselage, 2018). Keberadaan wanita dalam dewan juga memiliki hubungan dengan pengungkapan SDGs dalam SR (Girón *et al.*, 2020). Sementara itu, pelaporan SR maupun pengungkapan SDGs di Indonesia bersifat sukarela (Farida, 2019). Meskipun keberadaan wanita dalam dewan memberikan pengaruh positif pada pelaporan sukarela (Manita *et al.*, 2018) social and governance (ESG, namun posisi wanita di dewan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR (Farida, 2019). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis selanjutnya adalah:

H₄: Keberadaan wanita dalam dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal asosiatif dengan paradigma kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran direksi, proporsi komisaris independen, keberadaan *sustainability officer*, dan keberadaan wanita dalam dewan yang merupakan indikator dari tata kelola perusahaan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengungkapan dukungan SDGs dalam SR.

Pengungkapan dukungan SDGs diukur dengan menjumlahkan pengungkapan tujuan SDGs dalam SR. Ukuran direksi (UD) adalah pembagian total anggota dewan eksekutif dengan total anggota dewan (Cancela *et al.*, 2020). Komisaris independen (KI) diukur berdasarkan perbandingan komisaris independen terhadap jumlah komisaris (Cancela *et al.*, 2020; Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018). Selanjutnya, keberadaan *Sustainability Officer* (SO) diukur berdasarkan ada tidaknya pejabat SO dalam perusahaan (skor 4 diberikan untuk level direksi, skor 3 untuk level *senior manager*, skor 2 untuk level manajer divisi, dan skor 1 untuk level unit ke bawah). Keberadaan wanita dalam dewan (FOB) diprosikan dengan perbandingan jumlah anggota wanita di dewan terhadap jumlah total anggota dewan (Girón *et al.*, 2020).

Tabel 2. Jumlah Pengungkapan Masing-masing SDGs

SDGs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Disclosure	61	29	58	61	57	50	49	72	46	42	39	49	61	26	52	44	34
No Disc	15	47	18	15	19	26	27	4	30	34	37	27	15	50	24	32	42
Jumlah	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Jumlah	Minimum	Maksimum	Rata-rata
SDGs	76	3,00	17,00	10,9211
UD	76	2,00	13,00	6,4474
KI	76	0,00	1,00	0,3199
SO	76	1,00	4,00	1,7237
FOB	76	0,00	0,37	0,0992

Hubungan antar variabel penelitian diuji dengan menggunakan analisa statistik regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$SDGs = \alpha + \beta_1 (UD) + \beta_2 (KI) + \beta_3 (SO) + \beta_4 (FOB) + \varepsilon$$

Keterangan:

- SDGs* = Pengungkapan dukungan SDGs dalam SR
 $\beta_1 (UD)$ = Koefisien ukuran direksi terhadap SDGs
 $\beta_2 (KI)$ = Koefisien proporsi komisaris independen terhadap SDGs
 $\beta_3 (SO)$ = Koefisien keberadaan pejabat SO terhadap SDGs
 $\beta_4 (FOB)$ = Koefisien keberadaan wanita dalam dewan terhadap SDGs
 ε = error

Data penelitian terkait pengungkapan dukungan perusahaan terhadap SDGs diperoleh dari laporan keberlanjutan perusahaan dari tahun 2017 hingga 2019 yang dipublikasikan berdasarkan standar GRI melalui *National Center for Sustainability Reporting (NCSR)* yang merupakan NGO afiliasi GRI untuk Asia. Data terkait karakteristik tata kelola perusahaan yang tidak diungkapkan dalam SR diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan tahun 2017 hingga 2019.

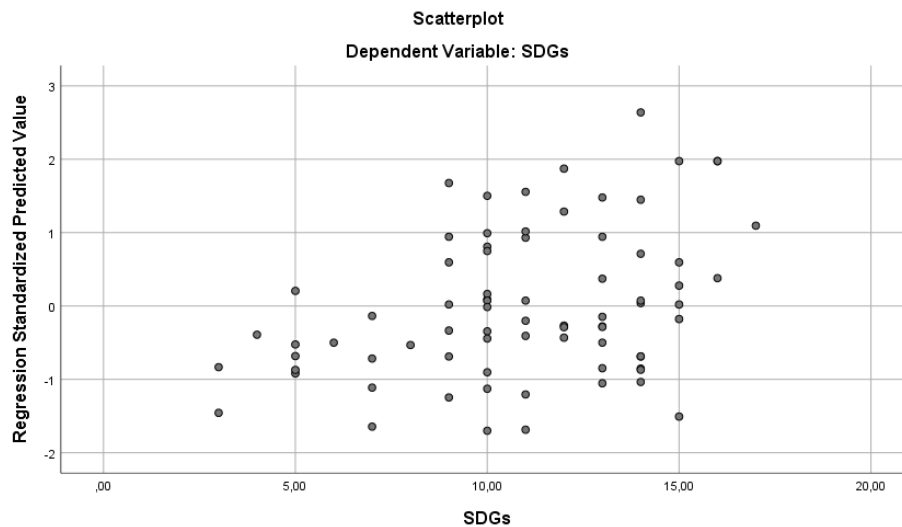
Dari 120 pelaporan SR yang dilaporkan melalui NCSR, hanya terdapat hanya 77 laporan keberlanjutan yang mengungkapkan dukungan terhadap SDGs dimana 19 perusahaan melakukan pengungkapan di tahun 2017, 26 perusahaan di tahun 2018 dan 32 perusahaan di tahun 2019. Satu data dikeluarkan dari sampel penelitian karena tidak diketemukannya informasi terkait karakteristik tata kelola perusahaan dalam SR maupun laporan tahunan perusahaan, sehingga diperoleh sejumlah 76 data sebagai sampel penelitian.

Dukungan pada masing-masing SDGs yang diungkapkan dalam ke-76 laporan keberlanjutan ini sangat beragam. SDGs yang lebih banyak diungkapkan adalah tujuan SDGs ke-8, yaitu tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebanyak 72 pengungkapan dari 76 SR. Hal ini tidak mengejutkan mengingat peran utama perusahaan sebagai penyedia pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Pengungkapan kedua yang banyak dilakukan adalah SDGs pertama tentang pemberantasan kemiskinan. Pada posisi ketiga adalah SDGs ke-4, yaitu pendidikan yang berkualitas, kemudian diikuti dengan SDGs ke-13, yaitu tentang perubahan iklim, dengan jumlah masing-masing 61 pengungkapan. Sementara SDGs yang paling sedikit diungkapkan adalah SDGs ke-14, yaitu tentang hayati di dalam air. Pengungkapan dukungan masing-masing SDGs selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata pengungkapan dukungan SDGs dalam SR perusahaan di Indonesia adalah 10,92, atau dapat dikatakan rata-rata hampir 11 dari 17 SDGs diungkapkan dalam SR, meskipun terdapat rentang yang cukup jauh antara pengungkapan terendah (3 tujuan) dan tertinggi (17 tujuan). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tata kelola perusahaan terkait kebutuhan informasi pemangku kepentingan terkait dukungan perusahaan terhadap SDGs di Indonesia masih sangat beragam, tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan cukup baik.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Jumlah rata-rata ukuran direksi (UD) adalah 6 anggota (6,4) dengan jumlah terkecil sebanyak 2 anggota dan jumlah terbesar sejumlah 13 anggota, dengan proporsi komisaris independen (KI) rata-rata 0,32 atau 1 berbanding 3. Beberapa perusahaan menempatkan pejabat keberlanjutan (*Sustainability Officer*) pada level direksi 4, namun lebih banyak keberadaan *Sustainability Officer* (SO) pada level yang lebih rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 1,72 yang berarti rata-rata pejabat SO hanya setingkat manajer divisi. Keberadaan wanita dalam dewan (FOB) tergolong masih rendah dengan rata-rata perbandingan 1 berbanding 10 anggota dewan (0,099). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SDGs kelima tentang kesetaraan gender di beberapa korporasi di Indonesia masih kurang.

Sebelum melakukan regresi linear berganda dimana hasil penelitian yang diharapkan bersifat BLUE (*Best Linier Unbias Estimates*), maka disyaratkan bahwa residual data berdistribusi normal, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak ada multikolinieritas, dan tidak terjadi autokorelasi (Ghozali & Ratmono, 2017). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi residual sebesar 0,2 ($>0,05$) sehingga data diasumsikan berdistribusi normal. Nilai toleransi lebih dari 0,1 dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) di bawah 10 yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Diagram *scatter plot* yang terbentuk tidak simetri sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas (Gambar 2). Uji autokorelasi tidak diharuskan pada penelitian kali ini, karena data yang digunakan tidak menggunakan data *time series*.

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa model yang digunakan penelitian ini adalah model yang layak digunakan dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 ($<0,05$).

Nilai *Adjusted R²* pada Tabel 4 adalah 0,085 yang berarti model dalam penelitian ini secara statistik memberikan kontribusi sebesar 8,5% dalam menjelaskan variasi yang mempengaruhi pengungkapan SDGs. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak faktor lain yang memiliki kontribusi kuat terhadap pengungkapan dukungan SDGs di luar tata kelola perusahaan.

Tabel 5 menunjukkan hasil regresi dalam penelitian ini. Nilai p-value lebih dari 0,05 untuk variabel ukuran direksi (0,15), komisaris independen (0,40), dan keberadaan wanita di dewan (0,61) lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran direksi (UD), proporsi komisaris independen (KI), dan keberadaan wanita di dewan (FOB) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan.

Keberadaan *Sustainability Officer* (SO) memiliki nilai signifikansi 0,003 ($<0,05$) yang artinya bahwa keberadaan SO secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan SDGs dalam laporan keberlanjutan. Hasil ini mempertegas hasil penelitian terdahulu Kılıç & Kuzey (2020) dan Cancela *et al.* (2020), sekaligus membantah hasil penelitian Masud, Nurunnabi, & Bae (2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun ukuran direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan keluasan pengungkapan SR (Kılıç & Kuzey, 2020; Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018; Mudiyansele, 2018), namun ukuran direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan dukungan SDGs.

Temuan bahwa proporsi komisaris independen tidak memengaruhi pengungkapan SDGs dalam SR mempertegas pernyataan bahwa komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
	Model	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4	27,834	2,736	,035 ^b
	Residual	71	10,172		
	Total	75			

a. *Dependent Variable:* SDGs

b. *Predictors:* (Constant), FOB, SO, KI, UD

Model Summary ^b				
Model	R	R ²	Adj. R ²	SSE
1	,365 ^a	,134	,085	3,18931

a. *Predictors:* (Constant), FOB, SO, KI, UD

b. *Dependent Variable:* SDGs

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Variabel	B	Std. Error	t	p-value
(Constant)	7,901	1,372	5,757	,000
UD	,229	,159	1,436	,155
KI	-1,483	1,785	-,831	,409
SO	1,301	,421	3,089	,003
FOB	-2,233	4,395	-,508	,613

kinerja dan pengungkapan SR (Kılıç & Kuzey, 2020). Hasil tersebut tentunya bertolak belakang dengan hasil penelitian di Asia Selatan dan Turki yang menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki hubungan dengan kinerja dan pengungkapan SR (Masud, Nurunnabi, & Bae, 2018; Kılıç & Kuzey, 2020). Hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya dimana keberadaan wanita di dewan memiliki hubungan positif dengan pengungkapan SDGs dalam SR (Girón *et al.*, 2020). Hal ini kemungkinan diakibatkan karena terdapat banyak perusahaan sampel penelitian yang sama sekali tidak memiliki wanita dalam anggota dewan.

Jika dikaitkan dengan teori pemangku kepentingan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua elemen dalam tata kelola perusahaan di Indonesia memahami pemangku kepentingan yang perusahaan seharusnya bertanggung jawab. Kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi terkait aktivitas dan tanggung jawab perusahaan terhadap keberlanjutan yang diprosikan melalui pengungkapan dukungan SDGs hanya dipahami oleh manajemen maupun unit terkait tata kelola keberlanjutan. Hasil ini juga menegaskan bahwa karakteristik tata kelola organisasi berpengaruh dalam kualitas pengungkapan SR (Girón *et al.*, 2020). Perusahaan dengan keberadaan tata kelola keberlanjutan pada level yang lebih tinggi memiliki pengungkapan dukungan SDGs yang lebih baik.

Berdasar hasil uji regresi di atas, untuk mengetahui derajat koefisiensi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

Jika dalam persamaan di atas diasumsikan bahwa nilai α (7,9) adalah nol, maka setiap kenaikan 1 ukuran direksi (UD) akan menaikkan pengungkapan SDGs dalam SR sebesar 22%. Sementara itu, kenaikan 1 Komisaris Independen (KI) justru akan menurunkan tingkat pengungkapan SDGs dalam SR sebesar 148%. Jika terjadi kenaikan pada *sustainability officer* (SO) sebesar 1 maka akan meningkatkan pengungkapan SDGs dalam SR sebesar 130%. Lalu kenaikan 1 tingkat wanita dalam dewan (FOB) akan menurunkan pengungkapan SDGs dalam SR sebesar 223%. Hasil uji regresi tersebut memperlihatkan bahwa ukuran direksi dan tata kelola keberlanjutan memiliki kontribusi positif terhadap pengungkapan SDGs. Namun, keberadaan komisaris independen dan wanita dalam dewan justru berkontribusi negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan (KI) dan wanita dalam dewan justru tidak mewakili kepentingan *stakeholder* terkait kebutuhan informasi keberlanjutan perusahaan.

Terkait dengan teori pemangku kepentingan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan mewakili kepentingan *stakeholder* jika dalam tata kelola perusahaan terdapat elemen terkait kepentingan tersebut. Dalam kasus kali ini, kebutuhan pemangku kepentingan terkait informasi keberlanjutan yang diprosikan melalui pengungkapan dukungan perusahaan terhadap SDGs hanya terwakili oleh tata kelola keberlanjutan perusahaan. Dengan kata lain, karakteristik tata kelola perusahaan berperan dalam kebutuhan pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Pengungkapan dukungan terhadap SDGs dalam laporan keberlanjutan korporasi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran tata kelola perusahaan terkait pentingnya kebutuhan informasi pemangku kepentingan terhadap upaya pelaksanaan dukungan korporasi terhadap SDGs semakin baik. Peran tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGs terbukti signifikan, baik itu komite CSR, komite keberlanjutan, maupun pejabat level tertentu terkait penanganan keberlanjutan. Keberadaan pejabat tata kelola keberlanjutan di Indonesia relatif kurang menjadi prioritas, padahal memiliki peran yang cukup signifikan terhadap pengungkapan dukungan SDGs dalam SR. Hal ini sesuai dengan teori pemangku kepentingan dimana organisasi berupaya dalam memahami kebutuhan dan tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan (Freeman, 2015). Upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan terkait keberlanjutan akan terwujud melalui tata kelola yang baik yang menunjukkan tata kelola keberlanjutan yang baik dalam kasus ini. Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan (SR) ini berfokus pada teori pemangku kepentingan untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Kecilnya kontribusi model penelitian di mana variabel bebas hanya mampu menjelaskan 8,5% variasi variabel terikat menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor selain tata kelola perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan dukungan SDGs dalam laporan keberlanjutan. Tata kelola perusahaan bisa jadi tidak terkait langsung dengan isu keberlanjutan tetapi secara tidak langsung terhadap dukungan SDGs atau terdapat faktor-faktor yang memediasi. Fakta yang menunjukkan masih sedikitnya jumlah entitas yang mempublikasikan laporan keberlanjutannya di Indonesia perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah maupun lembaga lainnya terkait penetapan SR dan pengungkapan dukungan SDGs sebagai publikasi yang bersifat *mandatory*. Disamping itu, setiap entitas perlu memiliki kesadaran mengenai pengungkapan dukungan SDGs terkait reputasi perusahaan di masyarakat dan selaku bangsa di mata dunia. Peran NCSR sebagai afiliasi GRI di Asia terkait standar laporan keberlanjutan diharapkan dapat memberikan rangsangan lebih, agar dalam SR, entitas pelapor mengungkapkan dukungan terhadap UN SDGs. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk mengukur pengungkapan dukungan SDGs dalam SR berdasarkan tujuan-tujuan khususnya, misalkan pengungkapan dukungan pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adel, C., Hussain, M. M., Mohamed, E. K. A., & Basuony, M. A. K. (2019). Is Corporate Governance Relevant to the Quality of Corporate Social Responsibility Disclosure in Large European Companies?. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27(2), 301–332. doi:10.1108/IJAIM-10-2017-0118.
- Agle, B. R., Mitchell, R. K., & Sonnenfeld, J. A. (1999). Who Matters to Ceos? An Investigation of Stakeholder Attributes and Salience, Corporate Performance, and Ceo Values. *Academy of Management Journal*, 42(5), 507–525. doi:10.5465/256973.
- Buallay, A. (2019). Is Sustainability Reporting (ESG) Associated with Performance? Evidence from the European Banking Sector. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(1), 98–115. doi:10.1108/MEQ-12-2017-0149.
- Buallay, A. & Al-Ajmi, J. (2019). The Role of Audit Committee Attributes in Corporate Sustainability Reporting: Evidence from Banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(2), 249–264. doi:10.1108/JAAR-06-2018-0085.
- Cancela, B. L., Neves, M. E. D., Rodrigues, L. L., & Dias, A. C. G. (2020). The Influence of Corporate Governance on Corporate Sustainability: New Evidence using Panel Data in the Iberian Macroeconomic Environment. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(4), 785–806. doi:10.1108/IJAIM-05-2020-0068.
- Claro, P. B. D. O. & Esteves, N. R. (2021). Sustainability-Oriented Strategy and Sustainable Development Goals. *Marketing Intelligence & Planning*, 39(4), 613-630. doi:10.1108/MIP-08-2020-0365.
- Cukuranovic, L. (2021). *Community Members by Country - GRI*. <https://www.globalreporting.org/media/fq0dq3j0/community-members-by-country.pdf>.

- Dragu, I.-M. (2013). Good Corporation. S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, & A. D. Gupta (Editor.). *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Springer, Berlin, Heidelberg. doi:0.1007/978-3-642-28036-8_534.
- Elalfy, A., Weber, O., & Geobey, S. (2021). The Sustainable Development Goals (SDGs): A Rising Tide Lifts All Boats? Global Reporting Implications in a Post SDGs World. *Journal of Applied Accounting Research*, 22(3), 557-575. doi:10.1108/JAAR-06-2020-0116.
- Elkington, J. (1998). Accounting for the Triple Bottom Line. *Measuring Business Excellence*, 2(3), 18–22. doi:10.1108/eb025539.
- Farida, D. N. (2019). Pengaruh Diversitas Gender terhadap Pengungkapan Sustainability Development Goals. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(2), 89-107. doi:10.30659/jai.8.2.89-107.
- Fialho, A., Félix, E. G. S., Jorge, F., & Moya, M. D. M. S. (2020). Communication of the Commitment to Sustainability and the UN SDGs in the Iberian Foundations. *Governance and Sustainability*, 15, 91–111. doi:10.1108/S2043-052320200000015006.
- Freeman, R. E. (2015). Stakeholder Theory. *Wiley Encyclopedia of Management*, 1–6. doi:10.1002/9781118785317.weom020179.
- Freeman, R. E. & McVea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *The Blackwell Handbook of Strategic Management*, 183–201. doi:10.1111/b.9780631218616.2006.00007.x.
- Ghozali, I. & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Girón, A., Kazemikhasragh, A., Cicchiello, A. F., & Panetti, E. (2020). Sustainability Reporting and Firms' Economic Performance: Evidence from Asia and Africa. *Journal of the Knowledge Economy*, 12, 1741-1759. doi:10.1007/s13132-020-00693-7.
- Hakovirta, M., Denuwara, N., Bharathi, S., Topping, P., & Eloranta, J. (2020). The Importance of Diversity on Boards of Directors' Effectiveness and its Impact on Innovativeness in the Bioeconomy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 7(1), 116. doi:10.1057/s41599-020-00605-9.
- Helfaya, A. & Moussa, T. (2017). Do Board's Corporate Social Responsibility Strategy and Orientation Influence Environmental Sustainability Disclosure? UK Evidence. *Business Strategy and the Environment*, 26(8), 1061–1077. doi:10.1002/bse.1960.
- Hussain, N., Rigoni, U., & Orij, R. P. (2018). Corporate Governance and Sustainability Performance: Analysis of Triple Bottom Line Performance. *Journal of Business Ethics*, 149(2), 411–432. doi:10.1007/s10551-016-3099-5.
- Idowu, S. O., Capaldi, N., Zu, L., & Gupta, A. D. (2013). *Encyclopedia of corporate social responsibility*. Berlin: Springer.
- Ioannou, I. & Serafeim, G. (2017). The Consequences of Mandatory Corporate Sustainability Reporting. *Harvard Business School Research Working Paper*, 11–100.
- Jamil, A., Ghazali, N. A. M., & Nelson, S. P. (2020). The Influence of Corporate Governance Structure on Sustainability Reporting in Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 17(8), 1251-1278. doi:10.1108/SRJ-08-2020-0310.
- Jangu, T., Darus, F., Zain, M. M., & Sawani, Y. (2014). Does Good Corporate Governance Lead to Better Sustainability Reporting? An Analysis Using Structural Equation Modeling. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 145, 138–145. doi:10.1016/j.sbspro.2014.06.020.
- Kay, J. & Silberston, A. (1995). Corporate Governance. *National Institute Economic Review*, 153(1), 84–107. doi:10.1177/002795019515300107.
- Kend, M. (2015). Governance, Firm-Level Characteristics and their Impact on the Client's Voluntary Sustainability Disclosures and Assurance Decisions. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(1), 54–78. doi:10.1108/SAMPJ-12-2013-0061.

- Kilincarslan, E., Elmagrhi, M. H., & Li, Z. (2020). Impact of Governance Structures on Environmental Disclosures in the Middle East and Africa. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 20(4), 739–763. doi:10.1108/CG-08-2019-0250.
- Kılıç, M. & Kuzey, C. (2020). *The Influence of Board Structure on GRI-Based Sustainability Reporting: Evidence from Turkish Listed Companies BT - Ethics, Governance and Risk Management in Organizations* (I. M. Saidon & R. Said (Editor.), hal. 109–129). Springer, Singapore. doi:10.1007/978-981-15-1880-5_8.
- Lashitew, A. A. (2021). Corporate Uptake of the Sustainable Development Goals: Mere Greenwashing or an Advent of Institutional Change?. *Journal of International Business Policy*, 4, 184-200. doi:10.1057/s42214-020-00092-4.
- Manita, R., Bruna, M. G., Dang, R., & Houanti, L. (2018). Board Gender Diversity and ESG Disclosure: Evidence from the USA. *Journal of Applied Accounting Research*, 19(2), 206–224. doi:10.1108/JAAR-01-2017-0024.
- Martinez-Ferrero, J., Rodríguez-Ariza, L., & García-Sánchez, I. M. (2017). The Strength of the Board on Sustainability Assurance Decisions. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 24(4), 863–886. doi:10.1108/JSBED-02-2017-0044.
- Masud, M. A. K., Nurunnabi, M., & Bae, S. M. (2018). The Effects of Corporate Governance on Environmental Sustainability Reporting: Empirical Evidence from South Asian Countries. *Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility*, 3(1), 3. doi:10.1186/s41180-018-0019-x.
- Mudiyansele, N. C. S. R. (2018). Board Involvement in Corporate Sustainability Reporting: Evidence from Sri Lanka. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 18(6), 1042–1056. doi:10.1108/CG-10-2017-0252.
- National Center for Sustainability Reporting (NCSR). (2020). *Press Release 2020*. <https://www.ncsr-id.org/wp-content/uploads/2021/01/Press-Release-ASRRAT-2020.pdf>.
- Santos, M. J. & Bastos, C. S. (2020). The Adoption of Sustainable Development Goals by Large Portuguese Companies. *Social Responsibility Journal*. doi:10.1108/SRJ-07-2018-0184.
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P.-L., & Krishnan, A. (2014). The Influence of Board Characteristics on Sustainability Reporting: Empirical Evidence from Sri Lankan Firms. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97. doi:10.1108/ARA-09-2013-0060.
- Smallman, C. (2007). The Process of Governance: Through a Practice Lens. *Managerial Law*, 49(5/6), 236–248. doi:10.1108/03090550710841359.
- United Nations. (2018). *The Sustainable Development Goals Report 2018A*. <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-EN.pdf>.
- United Nations. (2019a). *Global Sustainable Development Report: The Future is Now - Science for Achieving Sustainable Development*. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf.
- United Nations. (2019b). *The Sustainable Development Goals Report 2019*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf>.